

KAJIAN KETERSEDIAAN DAN POLA DISTRIBUSI FASILITAS PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS/ SEDERAJAT DI KABUPATEN KARANGANYAR

Mukmin Al Kahfi
mukminalkahfi@gmail.com

Dyah Widiyastuti
dwydiyastuti@yahoo.com

Abstract

Total facilities of Senior high school level education in Karanganyar only 53 units. Whereas to serve the residents of Karanganyar which amounted to 856,198 people, requires a senior high school level education facilities unit is more. This study aims to identify the availability, distribution patterns and completeness of facilities and infrastructure senior high school education in Karanganyar. The method used in this research is quantitative descriptive. The results of the analysis of the availability senior high school level education showed only Karanganyar subdistrict that meet the standards. Spatial range of senior high school in Karanganyar district lies in the typology medium that is 63.09%. It shows that the spatial range of senior high school in Karanganyar not yet reached the whole area of existing settlements. Scalling analysis results showed that Based on the type of education, the average percentage of senior high school education infrastructure by 90%, vocational high school 80% and Madrasah Aliyah amounted to 89%. Based on the status of education, the average percentage of infrastructure high school level with the status of the country reached 94% while the private status only reached 78%.

Keywords: educational facilities, infrastructure, distribution patterns

Abstrak

Fasilitas pendidikan tingkat SMA di Kabupaten Karanganyar hanya terdapat 53 unit. Sedangkan untuk melayani penduduk Kabupaten Karanganyar yang berjumlah 856.198 jiwa setidaknya membutuhkan unit fasilitas pendidikan tingkat SMA yang lebih banyak lagi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi ketersediaan, pola distribusi dan kelengkapan sarana prasarana fasilitas pendidikan SMA/Sederajat di Kabupaten Karanganyar. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Hasil analisis ketersediaan fasilitas pendidikan tingkat SMA menunjukkan hanya Kecamatan Karanganyar yang memenuhi standar. Jangkauan spasial fasilitas pendidikan SMA/ sederajat di Kabupaten Karanganyar terletak pada tipologi sedang yaitu 63,09 % yang menunjukkan bahwa jangkauan spasial pendidikan SMA/ sederajat di Kabupaten Karanganyar belum mencapai seluruh wilayah permukiman yang ada. Hasil analisis *scalling* menunjukkan bahwa berdasarkan jenis pendidikannya, persentase kelengkapan sarana prasarana pendidikan SMA, SMK dan MA adalah 90%, 80% dan 89%. Sedangkan berdasarkan status pendidikannya, sarana prasarana pendidikan tingkat SMA yang berstatus negeri dan swasta mencapai 94% dan 78%.

Kata kunci: fasilitas pendidikan, sarana prasarana, pola distribusi

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan aspek yang vital dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di suatu daerah. Setiap warga negara dijamin haknya untuk mendapatkan pendidikan seperti yang tertuang didalam Pembukaan UUD 1945 dan batang tubuh UUD 1945 yaitu pasal 31 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Berdasarkan data BPS Tahun 2016, jumlah fasilitas pendidikan tingkat SMA di Kabupaten Karanganyar terdapat 53 unit. Sedangkan untuk melayani penduduk Kabupaten Karanganyar yang berjumlah 856.198 jiwa setidaknya membutuhkan unit fasilitas pendidikan tingkat SMA yang lebih banyak lagi. faktor tersebut yang melatarbelakangi penelitian ini untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi ketersediaan, mengetahui pola distribusi dan mengetahui kelengkapan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan SMA/Sederajat di Kabupaten Karanganyar.

Fasilitas pendidikan yang ada di Indonesia telah diatur didalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 24 Tahun 2007. Standar tersebut mencakup sarana dan prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA. Standar satuan pendidikan SMA dan MA adalah:

1. Satu SMA/MA memiliki minimum 3 rombongan belajar dan maksimum 27 rombongan belajar.
2. Satu SMA/MA dengan 3 rombongan belajar maksimum melayani 6000 jiwa penduduk. Untuk pelayanan penduduk lebih dari 6000 jiwa dapat dilakukan penambahan rombongan belajar atau pembangunan SMA/MA baru.

Sementara itu untuk standar sarana dan prasarana SMK/MAK di Indonesia telah diatur didalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008. Standar satuan pendidikan SMK/MAK adalah Satu SMK/MAK memiliki minimum 3 rombongan belajar dan maksimum 48 rombongan belajar.

Perencanaan pendidikan sangat erat kaitannya dengan teori lokasi. Penempatan fasilitas pendidikan yang tepat diharapkan mampu menjangkau seluruh penduduk yang ada pada suatu daerah. Teori yang tepat didalam perencanaan fasilitas pendidikan salah satunya adalah teori menurut Christaller (1939). Penerapan model Christaller dalam perencanaan

pendidikan salah satunya adalah hirarki pelayanan fasilitas pendidikan. Di tingkat desa yang relatif memiliki jumlah penduduk yang sedikit, terdapat fasilitas pendidikan Sekolah Dasar (SD). Di tingkat kecamatan terdapat fasilitas pendidikan SMP atau SMA yang jangkauannya lebih luas daripada tingkat desa. Di tingkat kabupaten/kota terdapat universitas yang jangkauannya lebih luas daripada tingkat desa ataupun kecamatan. Hirarki wilayah dan pusat-pusat pelayanan pada umumnya mengacu pada teori pusat pelayanan yang dikembangkan oleh Christaller (Muta'ali, 2015). Muta'ali juga menjelaskan bahwa lokasi pusat pelayanan berdasarkan pandangan dari Christaller-Losch dan para pengikutnya dibagi menjadi dua faktor, yaitu dipengaruhi oleh faktor *the range of good* dan *the threshold value*.

1. *The range of good* adalah jarak yang ditempuh orang untuk mendapatkan barang kebutuhannya atau pelayanan tertentu.
2. *The threshold value* adalah Jumlah minimal penduduk yang diperlukan untuk kelancaran dan keseimbangan *supply* barang.

Letak atau penyebaran sekolah dalam konteks ruang perkotaan dapat didekati dengan melakukan analisis keruangan. Menurut Bintarto, 1982, pada hakekatnya analisis keruangan adalah analisis lokasi yang menitikberatkan kepada 3 unsur geografi yaitu jarak (*distance*), kaitan (*interaction*) dan gerakan (*movement*). Salah satu model dalam analisis keruangan adalah analisis tetangga terdekat (*nearest-neighbour analysis*) yang menggambarkan pola penyebaran pemukiman dalam 3 bentuk yaitu : (i) type *cluster* atau mengelompok, (ii) type *random*, dan (iii) type *reguler* atau seragam (Haggett, 1968 : 89).

Sarana dan prasarana pendidikan merupakan suatu alat penunjang bagi proses belajar mengajar. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan adalah hal yang wajib dimiliki oleh setiap pelayanan pendidikan termasuk tingkat SMA. Kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan telah diatur didalam Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 untuk SMA/MA dan Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008 untuk SMK. Sebuah SMA/SMK sekurang-kurangnya harus memiliki prasarana antara lain: ruang kelas, ruang perpustakaan, laboratorium, ruang pimpinan, ruang guru, tata usaha, tempat beribadah, ruang konseling, ruang UKS, ruang organisasi kesiswaan, jamban, gudang, ruang sirkulasi dan tempat berolahraga.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Pengumpulan data diperoleh dari instansi terkait yaitu BPS, Bappeda dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar serta plotting pada masing-masing fasilitas pendidikan

Analisis data yang digunakan didalam penelitian ini adalah analisis secara kuantitatif. Pengolahan data sekunder maupun hasil survei akan di olah dimana hasilnya berupa angka sehingga penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif. Kuantitatif dalam hal ini untuk mengukur ketersediaan dan pemanfaatan fasilitas pendidikan sekolah menengah serta mengetahui persebaran fasilitas tersebut.

Untuk mengidentifikasi ketersediaan fasilitas pendidikan tingkat SMA/ sederajat adalah dengan membandingkan jumlah penduduk yang ada di tiap kecamatan dengan jumlah sekolah eksisting. Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 menyebutkan bahwa untuk setiap daerah yang memiliki penduduk 6000 jiwa maka harus memiliki minimal 1 fasilitas pendidikan SMA/ Sederajat. Apabila daerah tersebut berpenduduk lebih dari 6000 maka perlu adanya penambahan rombongan belajar atau penambahan fasilitas sekolah baru.

Untuk mengetahui jangkauan pelayanan fasilitas pendidikan SMA/ Sederajat di Kabupaten Karanganyar, analisis yang digunakan adalah standar jangkauan fasilitas pendidikan menurut Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 dan kriteria jarak jangkauan fasilitas menurut konsep *Neighborhood Unit*.

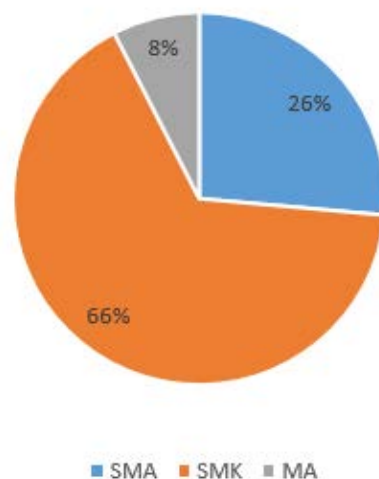
Scalling digunakan untuk mengetahui kelengkapan sarana dan prasarana pada masing-masing fasilitas pendidikan tingkat SMA yang terdapat di Kabupaten Karanganyar. Metode ini memberikan hirarki pada fasilitas pendidikan dimana apabila suatu sekolah memiliki sarana prasarana yang sesuai standar diberi nilai 1 sedangkan yang tidak memiliki diberi nilai 0. Kelengkapan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan SMA dan MA telah diatur dalam Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 sedangkan pendidikan SMK diatur dalam Permendiknas Nomor 40 tahun 2008 dimana masing-masing fasilitas pendidikan tingkat SMA minimal harus memiliki 18 prasarana yaitu, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium biologi, fisika, kimia, komputer dan bahasa, ruang pimpinan, ruang guru, ruang tata usaha, tempat ibadah, ruang

konseling, UKS, ruang organisasi kesiswaan, jamban, gudang, ruang sirkulasi dan tempat bermain/olahraga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketersediaan Fasilitas Pendidikan SMA/ Sederajat di Kabupaten Karanganyar

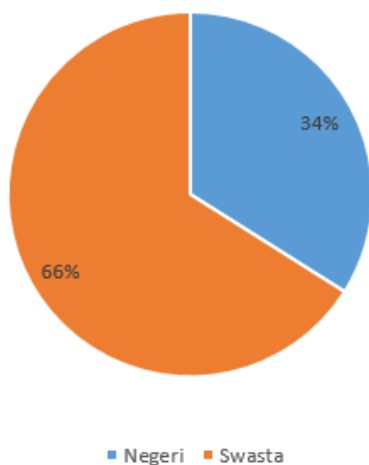
Tujuan pertama dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi ketersediaan fasilitas pendidikan SMA/ Sederajat yang terdapat di Kabupaten Karanganyar. Untuk mengetahui tujuan tersebut, analisis pertama yang dilakukan adalah mendeskripsikan kondisi eksisting jumlah fasilitas pendidikan tingkat SMA tiap kecamatan yang terdapat di Kabupaten Karanganyar. Deskripsi dilakukan berdasarkan jenis dan status fasilitas pendidikan. Berdasarkan jenisnya, fasilitas pendidikan tingkat SMA di Kabupaten Karanganyar terdapat 3 macam, yaitu: SMA, SMK dan MA. Sedangkan berdasarkan statusnya, fasilitas pendidikan tersebut terbagi menjadi 2, yaitu sekolah yang berstatus negeri dan yang berstatus swasta. Data BPS Kabupaten Karanganyar tahun 2016 menunjukan jumlah fasilitas pendidikan tingkat SMA sebanyak 53 unit



Gambar 1. Diagram Persentase Perbandingan Jumlah SMA, SMK dan MA di Kabupaten Karanganyar.

Dari 53 unit fasilitas yang ada, 35 unit diantaranya atau sekitar 66 % adalah fasilitas pendidikan SMK. Fasilitas pendidikan SMA memiliki jumlah yang lebih sedikit daripada pendidikan SMK. Jumlah fasilitas tersebut sebanyak 14 unit atau sekitar 26% dari seluruh fasilitas pendidikan tingkat SMA yang terdapat di

Kabupaten Karanganyar. Sedangkan fasilitas pendidikan MA hanya berjumlah 4 unit atau sekitar 8 %.



Gambar 2. Diagram Persentase Perbandingan Sekolah Negeri dan Swasta Tingkat SMA di Kabupaten Karanganyar.

Berdasarkan gambar 2, menunjukkan bahwa jumlah fasilitas pendidikan tingkat SMA yang berstatus swasta lebih banyak daripada jumlah fasilitas pendidikan tingkat SMA yang berstatus negeri. Dari 53 unit fasilitas pendidikan tingkat SMA di Kabupaten Karanganyar, 35 unit atau sekitar 66 % diantaranya adalah sekolah yang berstatus swasta. Sedangkan sisanya yang berjumlah 18 unit atau sekitar 34 % merupakan sekolah berstatus negeri.

Identifikasi ketersediaan fasilitas pendidikan tingkat SMA di Kabupaten Karanganyar dilakukan dengan membandingkan ketersediaan fasilitas pendidikan tingkat SMA yang ada terhadap standar pendidikan yang digunakan. Standar sarana pendidikan yang digunakan untuk menganalisis tujuan ini adalah Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007. Berikut adalah hasil perhitungan ketersediaan fasilitas pendidikan tingkat SMA tiap kecamatan di Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Ketersediaan Fasilitas Pendidikan SMA/ Sederajat di Kabupaten Karanganyar

No.	Kecamatan	Jumlah SMA/ Sederajat Eksisting	Kebutuhan Berdasarkan Standar Pelayanan	Kekurangan Fasilitas Pendidikan	Keterangan
1	Jatipuro	2	5	3	Tidak memenuhi
2	Jatiyoso	0	6	6	Tidak memenuhi
3	Jumapolo	1	6	5	Tidak memenuhi
4	Jumantono	1	7	6	Tidak memenuhi
5	Matesih	2	7	5	Tidak memenuhi
6	Tawangmangu	0	7	7	Tidak memenuhi
7	Ngargoyoso	1	7	6	Tidak memenuhi
8	Karangpandan	4	6	2	Tidak memenuhi
9	Karanganyar	19	13	0	Memenuhi
10	Tasikmadu	1	10	9	Tidak memenuhi
11	Jaten	3	14	11	Tidak memenuhi
12	Colomadu	4	13	9	Tidak memenuhi
13	Gondangrejo	8	13	5	Tidak memenuhi
14	Kebakkramat	3	10	7	Tidak memenuhi
15	Mojogedang	2	10	8	Tidak memenuhi
16	Kerjo	1	6	5	Tidak memenuhi
17	Jenawi	1	4	3	Tidak memenuhi

Sumber: Hasil Analisis, 2016

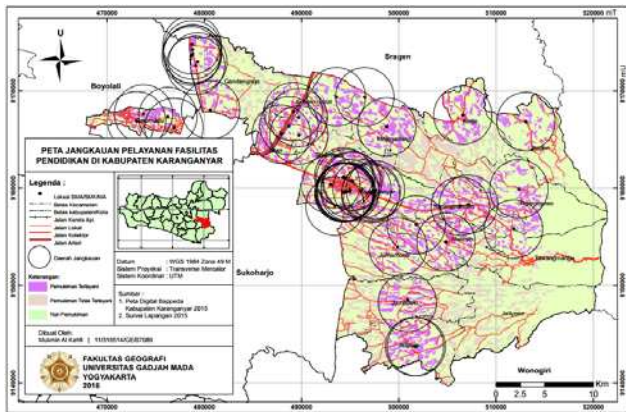
Hasil analisis menunjukkan bahwa ketersediaan fasilitas pendidikan tingkat SMA di Kabupaten Karanganyar masih tergolong rendah. Hal tersebut dapat ditunjukkan bahwa berdasarkan standar Permendiknas Nomor 24 tahun 2007, hanya Kecamatan Karanganyar yang jumlah fasilitas pendidikan tingkat SMA-nya sesuai. Sedangkan 16 kecamatan lainnya masih belum sesuai.

Kecamatan Tawangmangu dan Kecamatan Jatiyoso merupakan kecamatan di Kabupaten Karanganyar yang tidak memiliki fasilitas pendidikan tingkat SMA. Hal ini tidak sesuai dengan standar pendidikan menurut Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 dimana setiap kecamatan minimal memiliki 1 unit fasilitas pendidikan tingkat SMA.

Selain Kecamatan Tawangmangu dan Kecamatan Jatiyoso, ketersediaan fasilitas pendidikan tingkat SMA relatif merata. Namun ketersediaan fasilitas tersebut masih belum mencukupi kebutuhan penduduk yang ada di tiap-tiap kecamatan. Kecamatan-kecamatan yang memiliki fasilitas pendidikan tingkat SMA namun ketersediaannya belum memenuhi penduduk adalah Kecamatan Jatipuro, Jumapolo, Jumantono, Matesih, Karangpandan, Ngargoyoso, Tasikmadu, Jaten, Colomadu, Gondangrejo, Kebakkramat, Mojogedang, Kerjo dan Jenawi.

Jangkauan Spasial Fasilitas Pendidikan SMA/Sederajat di Kabupaten Karanganyar

Hasil analisis jangkauan pelayanan fasilitas pendidikan SMA/ sederajat dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 3. Peta Jangkauan Spasial Fasilitas Pendidikan Tingkat SMA Kab. Karanganyar

Berdasarkan gambar 3, jangkauan fasilitas pendidikan tingkat SMA di Kabupaten Karanganyar masih belum menjangkau seluruh permukiman yang ada. Hal tersebut disebabkan karena kecenderungan persebaran fasilitas pendidikan tingkat SMA yang mengelompok di beberapa kecamatan.

Kecenderungan persebaran fasilitas pendidikan tingkat SMA yang mengelompok, berdampak pada tumpang tindihnya jangkauan fasilitas pendidikan tersebut. Hasil analisis pada gambar 3 menunjukkan bahwa tumpang tindihnya jangkauan pendidikan tingkat SMA yang paling tinggi adalah di Kecamatan Karanganyar. Persebaran fasilitas pendidikan yang mengelompok menyebabkan hanya sebagian kecil permukiman yang terlayani oleh fasilitas pendidikan tersebut. Selain itu menyebabkan banyak permukiman di kecamatan lain yang tidak terlayani oleh fasilitas pendidikan tingkat SMA di Kabupaten Karanganyar. Untuk mengetahui seberapa besar permukiman yang terlayani fasilitas pendidikan tingkat SMA, berikut adalah tabel persentase luas permukiman yang terlayani fasilitas pendidikan tingkat SMA di Kabupaten Karanganyar.

Tabel 2. Persentase Luas Wilayah Permukiman yang Terlayani Fasilitas Pendidikan Tingkat SMA di Kecamatan Karanganyar

No.	Kecamatan	Luas Wilayah Permukiman (Ha)	Luas Wilayah Permukiman yang Terlayani Fasilitas Pendidikan SMA/ Sederajat (Ha)	Persentase	Tipologi
1	Jatipuro	1449	855	59.01%	Sedang
2	Jatiyoso	1148	6	0.52%	Rendah
3	Jumapolo	2000	849	42.45%	Rendah
4	Jumantono	1623	1034	63.71%	Sedang
5	Matesih	1022	796	77.89%	Tinggi
6	Tawangmangu	563	140	24.87%	Rendah
7	Ngargoyoso	1106	894	80.83%	Tinggi
8	Karangpandan	1248	1140	91.35%	Tinggi
9	Karanganyar	1544	1395	90.35%	Tinggi
10	Tasikmadu	885	689	77.85%	Tinggi
11	Jaten	904	769	85.07%	Tinggi
12	Colomadu	678	582	85.84%	Tinggi
13	Gondangrejo	1446	886	61.27%	Sedang
14	Kebakkramat	1124	974	86.65%	Tinggi
15	Mojogedang	2398	1132	47.21%	Rendah
16	Kerjo	1248	782	62.66%	Sedang
17	Jenawi	801	444	55.43%	Sedang
Total		21187	13367	63.09%	Sedang

Sumber: Hasil Analisis, 2016

Tabel 2 menunjukkan bahwa sebagian besar persentase luas permukiman yang dilayani fasilitas pendidikan tingkat SMA berada pada tipologi tinggi. Terdapat 8 kecamatan yang berada pada tipologi tinggi yaitu Kecamatan Matesih (77.89 %), Kecamatan Ngargoyoso (80,83 %), Kecamatan Karangpandan (91,35 %), Kecamatan Karanganyar (90,35 %), Kecamatan Tasikmadu (77,85 %), Kecamatan Jaten (85,07 %), Kecamatan Colomadu (85,84 %) dan Kecamatan Kebakkramat (86,65 %).

Kecamatan Matesih hanya memiliki 2 unit fasilitas pendidikan tingkat SMA akan tetapi jangkauan fasilitas pendidikannya memiliki tingkat yang tinggi yaitu pada angka 77.89 %. Apabila dilihat dari gambar 3 faktor yang menyebabkan Kecamatan Matesih memiliki tingkat jangkauan pelayanan yang tinggi disebabkan oleh adanya faktor eksternal yaitu adanya penerimaan pelayanan sekolah dari luar Kecamatan Matesih.

Hal serupa juga terjadi di Kecamatan Tasikmadu dan Kecamatan Jaten. Kedua kecamatan tersebut hanya memiliki fasilitas pendidikan tingkat SMA yang sedikit. Jumlah fasilitas pendidikan tingkat SMA di Kecamatan Tasikmadu hanya 1 unit sedangkan di Kecamatan Jaten terdapat 2 unit. Akan tetapi kedua kecamatan ini memiliki persentase yang tinggi yaitu 77.85 % dan 85.07 %. Sama seperti di Kecamatan Matesih, kedua kecamatan ini

mendapatkan jangkauan pelayanan dari luar kecamatan. Dilihat dari gambar 3, kecamatan Tasikmadu lebih banyak mendapatkan jangkauan dari fasilitas pendidikan yang ada di Kecamatan Karanganyar, sedangkan Kecamatan Jaten berasal dari fasilitas pendidikan yang terdapat di Kecamatan Kebakkramat.

Kecamatan Ngargoyoso juga memiliki tingkat jangkauan pelayanan fasilitas pendidikan SMA/ sederajat yang tinggi. Nilai persentase jangkauan pelayanan pendidikan SMA/ sederajat di Kecamatan Ngargoyoso mencapai 80,83 %. Selain karena faktor eksternal adanya penerimaan pelayanan pendidikan dari luar, faktor lain adalah karena luas wilayah permukiman di Kecamatan Ngargoyoso yang relatif kecil dan mengelompok di bagian barat wilayah kecamatan tersebut. Pengelompokan permukiman sangat mudah dijangkau oleh fasilitas pelayanan khususnya fasilitas pendidikan.

Kecamatan Karangpandan, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Kebakkramat dan Kecamatan Colomadu adalah beberapa kecamatan dengan persentase jangkauan pelayanan yang tinggi dan fasilitas pendidikannya relatif berasal dari dalam kecamatan itu sendiri. Faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi adalah karena kecamatan-kecamatan tersebut memiliki fasilitas pendidikan tingkat SMA yang relatif lebih banyak daripada kecamatan lain sehingga jangkauannya termasuk dalam tipologi tinggi.

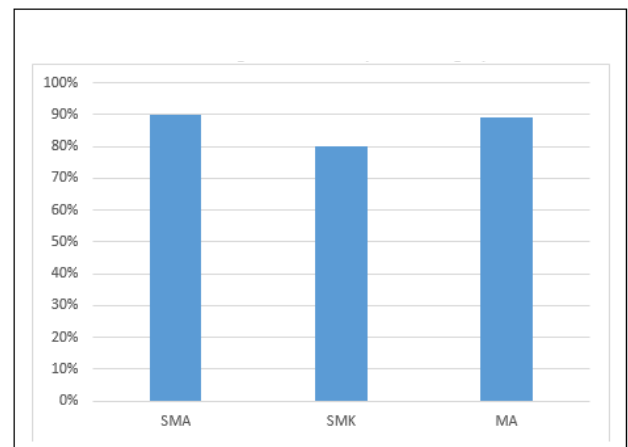
Tabel 2 juga menunjukkan adanya beberapa kecamatan yang memiliki tipologi jangkauan pelayanan pendidikan SMA/ sederajat yang sedang. Beberapa kecamatan tersebut antara lain adalah Kecamatan Jatipuro (59,01 %), Kecamatan Jumantono (63,71 %), Kecamatan Gondangrejo (61,27 %), Kecamatan Kerjo (62,66 %) dan Kecamatan Jenawi (55,43 %). Kecamatan-kecamatan tersebut umumnya hanya memiliki sedikit fasilitas pendidikan tingkat SMA dan hanya menjangkau beberapa permukiman yang ada.

Kecamatan Jatiyoso, Kecamatan Jumapolo, Kecamatan Tawangmangu dan Kecamatan Mojogedang merupakan kecamatan yang memiliki tingkat jangkauan pelayanan pendidikan SMA/ sederajat yang rendah. Kecamatan Jatiyoso merupakan daerah dengan jangkauan pelayanan pendidikannya yang paling rendah yaitu hanya 0.52 % dari seluruh luas permukiman yang ada. Jika dilihat pada gambar

3, ada dua faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Pertama adalah karena Kecamatan Jatiyoso tidak memiliki fasilitas pendidikan tingkat SMA sehingga hanya menerima jangkauan pelayanan pendidikan dari luar kecamatan tersebut. Kedua adalah karena letak Kecamatan Jatiyoso yang termasuk daerah *hinterland* yaitu berada di ujung timur selatan wilayah Kabupaten Karanganyar. Faktor ini mengakibatkan rendahnya jangkauan pelayanan pendidikan dari kecamatan lain. Hanya terdapat sekitar 6 Ha luas wilayah yang terlayani fasilitas pendidikan SMA/ sederajat dari 1.148 Ha luas wilayah permukiman seluruhnya.

Ketersediaan Sarana Prasarana Fasilitas Pendidikan SMA/ Sederajat di Kabupaten Karanganyar

Ketersediaan sarana prasarana penunjang pendidikan telah diatur didalam peraturan perundang-undangan. Terdapat perbedaan peraturan antara fasilitas pendidikan SMA dan MA dengan fasilitas pendidikan SMK. Fasilitas pendidikan SMA/MA diatur didalam Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007, sedangkan fasilitas pendidikan SMK diatur dalam Permendiknas Nomor 40 tahun 2008.

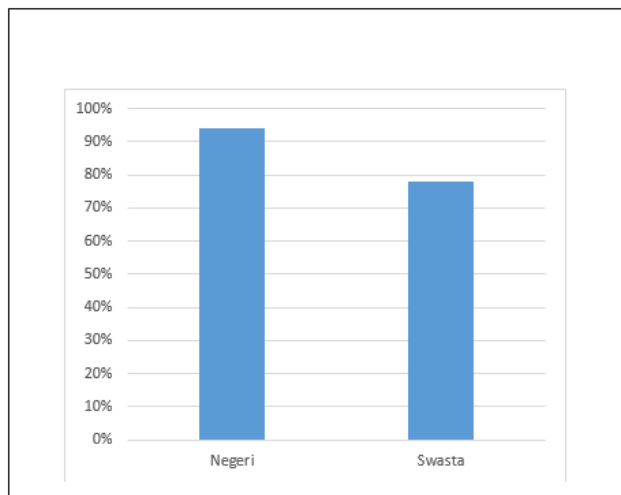


Sumber: Hasil Analisis, 2016

Gambar 4. Kelengkapan Sarana Prasarana Pendidikan SMA/ Sederajat Berdasarkan Jenis Pendidikannya

Berdasarkan gambar 4, secara keseluruhan kelengkapan sarana prasarana pendidikan tingkat SMA di Kabupaten Karanganyar hampir sama, dengan persentase kelengkapan lebih dari 80 % baik itu SMA, SMK ataupun MA. Nilai tersebut menunjukkan bahwa rata-rata kelengkapan sarana prasarana pendidikan tingkat SMA di Kabupaten

Karanganyar sudah baik. Kelengkapan sarana prasarana pendidikan merupakan hal yang mutlak untuk dipenuhi setiap fasilitas pendidikan karena berfungsi sebagai penunjang proses belajar.



Sumber: Hasil Analisis, 2016

Gambar 5. Kelengkapan Sarana Prasarana Pendidikan SMA/ Sederajat Berdasarkan Status Pendidikannya

Berdasarkan gambar 5, terlihat bahwa kelengkapan sarana prasarana fasilitas pendidikan negeri tingkat SMA lebih baik daripada fasilitas pendidikan swasta. Rata-rata kelengkapan sarana prasarana untuk fasilitas pendidikan negeri mencapai 94 %, sedangkan untuk fasilitas pendidikan swasta hanya mencapai 78 %. Kelengkapan sarana prasarana pendidikan negeri tingkat SMA yang sangat baik ini menunjukkan bahwa pemerintah dalam menyediakan fasilitas pendidikan tingkat SMA sangat memperhatikan kualitas pendidikannya. Sedangkan fasilitas pendidikan swasta perlu adanya peningkatan kelengkapan sarana prasarana guna menunjang kegiatan pendidikan yang lebih efisien.

Tabel 3. Persentase Rata-Rata Kelengkapan Sarana dan Prasarana Pendidikan Tingkat SMA Tiap Kecamatan di Kab. Karanganyar

No.	Kecamatan	Jumlah Pendidikan Tingkat SMA	Rata-rata Kelengkapan Sarana Prasarana
1	Colomadu	4 unit	86%
2	Gondangrejo	8 unit	80%
3	Jaten	3 unit	73%
4	Jatipuro	2 unit	81%
5	Jenawi	1 unit	94%
6	Jumantono	1 unit	83%
7	Jumapolo	1 unit	100%
8	Karanganyar	19 unit	86%
9	Karangpandan	4 unit	82%
10	Kebakkramat	3 unit	81%
11	Kerjo	1 unit	100%
12	Matesih	2 unit	81%
13	Mojogedang	1 unit	94%
14	Ngargoyoso	1 unit	72%
15	Tasikmadu	2 unit	79%

Sumber: Hasil Analisis, 2016

Berdasarkan standar yang digunakan, rata-rata kelengkapan sarana prasarana pendidikan tingkat SMA tiap kecamatan sudah baik namun belum lengkap. Secara umum hasil analisis pada tabel 3 menunjukkan bahwa terdapat 2 kecamatan yang memiliki kelengkapan sarana prasarana pendidikan sebesar 100 %. Kedua kecamatan tersebut adalah Kecamatan Jumapolo dan Kecamatan Kerjo. Nilai yang sangat tinggi tersebut karena kedua kecamatan diatas masing-masing hanya memiliki 1 unit fasilitas pendidikan tingkat SMA. Jenis pendidikan yang terdapat di kedua kecamatan tersebut adalah SMA. Seperti yang diketahui pada gambar 4, bahwa rata-rata kelengkapan sarana prasarana pendidikan SMA merupakan yang paling tinggi diantara SMK ataupun MA. Kedua fasilitas pendidikan yang terdapat di Kecamatan Jumapolo dan Kerjo merupakan fasilitas pendidikan tingkat SMA yang berstatus negeri. Dilihat pada gambar 5, menunjukkan bahwa sekolah yang berstatus negeri rata-rata memiliki kelengkapan sarana prasarana yang baik. Kecamatan lain yang memiliki kelengkapan sarana prasarana yang baik adalah Kecamatan Jenawi (94%) dan Kecamatan Mojogedang (94%). Sama seperti Kecamatan Jumapolo dan Kecamatan Kerjo, kedua kecamatan tersebut status pendidikannya adalah negeri dengan jenis pendidikan yang terdapat di Kecamatan Jenawi adalah SMK dan Kecamatan Mojogedang adalah SMA.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan standar Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007, ketersediaan fasilitas pendidikan tingkat SMA tiap kecamatan di Kabupaten Karanganyar masih sangat kurang. Hanya Kecamatan Karanganyar yang memenuhi standar tersebut.
2. Jangkauan spasial fasilitas pendidikan SMA/ sederajat di Kabupaten Karanganyar terletak pada tipologi sedang yaitu 63,09 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa jangkauan pelayanan pendidikan SMA/ sederajat di Kabupaten Karanganyar belum mencapai seluruh wilayah permukiman yang ada.
3. Hasil analisis *scalling* menunjukkan bahwa ketersediaan sarana prasarana pendidikan tingkat SMA di Kabupaten Karanganyar sangat beragam. Berdasarkan jenis pendidikannya, persentase rata-rata sarana prasarana pendidikan SMA sebesar 90%, SMK sebesar 80% dan MA sebesar 89%. Berdasarkan status pendidikannya, persentase rata-rata sarana prasarana pendidikan tingkat SMA yang berstatus negeri mencapai 94% sedangkan yang berstatus swasta hanya mencapai 78%. Persentase rata-rata sarana prasarana tiap kecamatan menunjukkan nilai yang beragam. Berikut adalah nilai persentase rata-rata sarana prasarana tiap kecamatan dari yang paling besar ke yang paling kecil, Kecamatan Jumapolo (100%), Kecamatan Kerjo (100%), Kecamatan Jenawi (94%), Kecamatan Mojogedang (94%), Kecamatan Karanganyar (86%), Kecamatan Colomadu (86%), Kecamatan Jumantono (83%), Kecamatan Karangpandan (82%), Kecamatan Kebakkramat (81%), Kecamatan Jatipuro (81%), Kecamatan Matesih (81%), Kecamatan Gondangrejo (80%), Kecamatan Tasikmadu (79%), Kecamatan Jaten (73%), dan Kecamatan Ngargoyoso (72%).
4. Perlu penambahan unit fasilitas pendidikan tingkat SMA khususnya di Kecamatan Tawangmangu dan Kecamatan Jatiyoso sebab kedua kecamatan tersebut belum tersedia fasilitas pendidikan tingkat SMA.
5. Kelengkapan sarana prasarana pendidikan merupakan hal yang sangat penting yang harus dimiliki setiap fasilitas pendidikan. Rata-rata persentase kelengkapan sarana prasarana pendidikan tingkat SMA yang berstatus

swasta hanya mencapai 78%. Pihak pemilik fasilitas pendidikan swasta tersebut seharusnya juga memperhatikan kelengkapan sarana prasarana pendidikan untuk melengkapinya mengingat jumlah fasilitas pendidikan swasta tingkat SMA lebih banyak daripada jumlah fasilitas pendidikan negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistika (BPS) Kabupaten Karanganyar. 2016. *Karanganyar Dalam Angka*. Karanganyar: BPS Kabupaten Karanganyar.
- Bintarto. 1982. *Metode Analisis Geografi*. Jakarta : LP3ES.
- Haggett, Peter. 1968. *Locational Analysis in Human Geography*. London : Edward Arnold LTD
- Muta'ali, Luthfi. 2015. *Teknik Analisis Regional*. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. 2007. *Peraturan Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah (SMA/MA)*.
- _____. 2008. *Peraturan Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk SMK/MAK*.